

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, muncul *internet* yang merupakan salah satu bentuk perkembangan dari teknologi informasi dan mampu menyederhanakan serta meringankan kerja manusia (Dwiningrum, 2012; dalam Tenardi, 2020). Menurut Patel, Patel, dan Scholar (2016), karakteristik *internet* seperti mampu berkomunikasi berskala luas/global serta mampu diakses berbagai perangkat mempermudah penyebaran informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan *internet* menjadi lebih luas, bukan hanya digunakan untuk menyebarkan informasi berita tetapi sudah berkembang dalam bidang pendidikan dan bisnis. Salah satu bentuk perkembangan *internet* di bidang bisnis adalah *website* yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif.

Dalam kegiatan bisnis, perusahaan bukan hanya menggunakan *internet* untuk memasarkan dan menjual produk, tetapi juga salah satunya sebagai sarana berkomunikasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan pihak yang secara parsial maupun keseluruhan memiliki hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Komunikasi diperlukan karena perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat bagi *stakeholder* atau pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, *supplier*, dan sebagainya (Alfaiz dan Aryati, 2019). Menurut Sofa dan Respati (2020), terdapat dua macam *stakeholder* yakni internal dan eksternal. *Stakeholder* internal atau pemangku kepentingan internal perusahaan mencakup karyawan, pemilik, manajer, sedangkan *stakeholder* eksternal mencakup pemerintah, calon investor, kreditur. *Stakeholder* internal memerlukan pelaporan hasil performa perusahaan untuk dijadikan bahan evaluasi dan memperbaiki periode berikutnya, sedangkan *stakeholder* eksternal memerlukan pelaporan hasil performa perusahaan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Komunikasi dengan *stakeholder* dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi kepada publik terkait kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat pihak agen dan pihak prinsipal yang terlibat dalam suatu kontrak kerja. Pihak prinsipal atau pemilik sebagai penyeter modal mempekerjakan manajemen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Oleh karena hubungan keagenan tersebut, timbul kewajiban pihak agen untuk melakukan pelaporan atas hasil kinerjanya kepada pihak prinsipal. Namun hubungan keagenan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya setiap manusia memiliki *self-interest* atau mementingkan dirinya sendiri (Eisenhardt, 1989; dalam Bosse dan Philips, 2016).

Manajemen dan pemilik adalah pihak yang berbeda dimana masing-masing pihak memiliki perbedaan kepentingan dan akan cenderung mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen yang seharusnya mencapai kepentingan pemilik, akan menempatkan kepentingannya di atas pemilik sehingga memungkinkan manajemen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik. Maka perbedaan kepentingan inilah yang disebut konflik kepentingan antara manajemen dengan prinsipal. Celah yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan adalah ketika manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan lebih menguasai informasi internal perusahaan dan prospek bisnis perusahaan dibandingkan pemilik, serta pemilik mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan melalui apa yang dilaporkan manajemen. Hal tersebut yang kemudian dikenal sebagai asimetri informasi atau kesenjangan informasi antara manajemen dan pemilik. Maka untuk mencegah risiko asimetri informasi tersebut, dapat dilakukan melalui *Internet Financial Reporting (IFR)* yang memungkinkan perusahaan melakukan pelaporan dengan tetap memperhatikan transparansi informasi sehingga dapat lebih meyakinkan pemangku kepentingan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pemanfaatan IFR tidak hanya menjadi solusi bagi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi, tetapi juga terkait efisiensi biaya distribusi dan waktu dalam pelaporan. Hal tersebut dikarenakan pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan awalnya dilakukan dengan metode *paper-based reporting*

system yakni menyelesaikan laporan keuangan dan laporan tahunan, lalu dicetak dan dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui pengiriman surat lewat kantor pos. Namun hal tersebut dirasa kurang efektif karena bagaimanapun juga pemangku kepentingan membutuhkan informasi yang tepat dan juga cepat diperoleh. Oleh karena itu, terdapat regulasi yang mulai mengatur sistem pelaporan dari *paper-based reporting system* menjadi *paper-less reporting system* seperti Surat Edaran Nomor 6/SEOJK.04/2014 yang dibuat oleh OJK, yang menjabarkan bahwa perusahaan publik atau emiten perlu menambah format laporan keuangan menjadi *hard copy* dan *soft copy*. Oleh karena itu, IFR memungkinkan metode pelaporan keuangan yang semula *paper-based reporting system* menjadi *paper-less reporting system* (Hanifa dan Rashid, 2005; dalam Rizqiyah dan Lubis, 2017). *Paper-less reporting system* yakni pelaporan keuangan yang dilakukan manajemen dengan cara mengunggah pelaporan keuangan melalui *website* perusahaan sehingga menghemat biaya distribusi seperti biaya pencetakan dan penggandaan dokumen sekaligus waktu distribusi kepada *stakeholder* atau waktu penyampaian informasi dapat dilakukan lebih *real time*.

IFR merupakan pelaporan keuangan melalui *website* resmi perusahaan untuk melindungi kepentingan *stakeholder* (Dewi dan Suryono, 2019). Terdapat banyak pemangku kepentingan yang memerlukan pelaporan keuangan perusahaan, namun dalam kerangka konseptual telah ditetapkan bahwa investor dan kreditur merupakan pihak utama yang dituju pelaporan keuangan (Nuswandari, 2009). Kedua *stakeholder* tersebut membutuhkan pelaporan keuangan yang tepat dan cepat karena *stakeholder* ingin memahami kondisi perusahaan serta menjadikan pelaporan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan baik investasi maupun pemberian fasilitas kredit. Pada sisi perusahaan, *Internet Financial Reporting* mencoba memberikan solusi bagi perusahaan demi efisiensi waktu dan biaya distribusi informasi agar mampu menunjukkan transparansi perusahaan serta mendapat kepercayaan publik. Bukan hanya itu, manfaat penerapan IFR jika dilihat dari sisi *stakeholder* juga dapat mempercepat serta mempermudah dalam mengakses informasi perusahaan.

Sebagai sarana pelaporan kepada pemangku kepentingan, terdapat 2 jenis pengungkapan melalui IFR atau dengan kata lain pengungkapan yang terkandung dalam *website* resmi perusahaan yakni pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Dalam penelitian ini, pengungkapan wajib dalam IFR perusahaan publik Indonesia hanya mengacu pada peraturan OJK. Pengungkapan wajib dalam IFR hanya mengacu pada peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015. Dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Pasal 2 dinyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki *website* resmi perusahaan. Selanjutnya dalam pasal 6 Nomor 8/POJK.04/2015, juga dijabarkan terkait empat komponen informasi yang wajib diungkapkan yakni informasi umum perusahaan publik/ emiten (struktur organisasi, struktur kepemilikan, profil manajemen dan sebagainya), informasi bagi investor (laporan keuangan tahunan, informasi harga saham, informasi dividen), informasi tata kelola perusahaan (pedoman kerja dan kode etik), dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (jenis program pengembangan sosial kemasyarakatan). Dalam praktiknya, perusahaan publik di Indonesia wajib mengungkapkan IFR namun luas pengungkapan atau item yang diungkapkan masih bervariasi setiap perusahaan sehingga item yang diungkap selain yang diwajibkan itulah yang kemudian disebut sebagai pengungkapan sukarela. Menurut Nuswandari (2009), pengungkapan sukarela merupakan informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan melebihi yang diwajibkan yang biasanya diberitahukan manajemen supaya menunjukkan kredibilitas perusahaan dan membantu pengguna laporan keuangan mampu memahami kondisi perusahaan secara keseluruhan. Biasanya pengungkapan sukarela ini disajikan karena dipertimbangkan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. Maka dapat disimpulkan IFR merupakan pengungkapan wajib bagi perusahaan publik di Indonesia. Hanya saja dalam penerapannya, setiap perusahaan memiliki tingkat pengungkapan informasi yang masih bervariasi. Padahal setiap tingkat pengungkapan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengambilan keputusan *stakeholder*, dimana semakin lengkap akan semakin mempengaruhi keputusan yang diambil *stakeholder*. Dalam penerapannya terdapat perbedaan tingkat keluasan pelaporan yang dilakukan perusahaan yang rawan disebabkan oleh

salah satunya perbedaan kepentingan manajemen dan pemilik. Padahal di sisi lain, seharusnya pengungkapan dilakukan untuk menunjukkan transparansi, informatif, dan melindungi kepentingan pengguna.

Dalam penelitian ini, juga ditinjau terkait keluasan pengungkapan IFR yang tidak hanya terbatas pada seberapa lengkap isi (*content*) disajikan tetapi juga terkait hal teknis pendukung yang mempermudah pengguna informasi mengakses informasi yang disajikan sekaligus mempercepat pengguna informasi mendapatkan informasi. Hal tersebut dikarenakan informasi dapat berguna bukan hanya dari seberapa lengkap informasi diberikan tetapi juga diberikan tepat waktu (tetap relevan jika dijadikan dasar pengambilan keputusan) serta mudah diakses pengguna. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi IFR itu sendiri yang mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, dalam pengukuran IFR, terdapat empat komponen yakni isi (*content*), ketepatanwaktuan (*timeliness*), teknologi (*technology*), dan dukungan pengguna (*user support*) (Handayani dan Almilia, 2013; dalam Widari, Saifi, dan Nurlaily, 2018).

Meskipun banyak kebutuhan serta keuntungan dari implementasi IFR, namun awalnya hanya sebagian perusahaan yang menerapkan IFR. Hal tersebut terjadi karena IFR memiliki beberapa kekurangan yakni regulasi yang mengatur IFR secara khusus belum tersedia, biaya untuk merawat *website* terkadang melebihi manfaat yang diperoleh, serta diungkapkannya informasi secara luas akan meningkatkan potensi perusahaan kehilangan keunggulan kompetitifnya (Ferina, 2019:2). Regulasi atau peraturan terkait IFR baru dibentuk pada tahun 2012 yakni KEP-431/BL/2012 oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lalu seiring dengan berkembangnya regulasi yang terus diperbaharui, akhirnya pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yakni POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 08/POJK.04/2015 yang berisi bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki *website* resmi perusahaan. Bukan hanya kurangnya sosialisasi wajibnya IFR, tetapi manajemen perusahaan juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti baik buruknya hasil kinerja yang dilaporkan lalu akan mempengaruhi keputusan baik investor lama maupun calon investor. Faktor-faktor yang kemungkinan akan mempengaruhi

keluasan pengungkapan IFR adalah komisaris independen, risiko hutang, aktivitas pasar, dan kepemilikan saham publik (Puspa, Sulistiyo & Samani, 2021; Oktaviani, Andriati & Larasati, 2020; Budianto, 2018).

Faktor pertama adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan salah satu bentuk mekanisme GCG (*Good Corporate Governance*) internal yang dapat digunakan investor perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen. Dalam peraturan 57/POJK.04/2017, OJK mendefinisikan komisaris independen perusahaan publik sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen. Tugas komisaris independen adalah menjalankan fungsi audit dan menjadi ketua komite audit. Tugas komisaris independen yang lebih spesifik yakni memeriksa informasi keuangan yang akan dipublikasikan perusahaan kepada publik serta bertanggung jawab memeriksa dan mengawasi direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit internal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan akan mendorong pengungkapan informasi (transparansi) secara lengkap melalui IFR. Berdasarkan penelitian Puspa, dkk. (2021), jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*, sedangkan menurut Mudjiyanti dan Andriyani (2017) jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Faktor kedua adalah risiko hutang. Dalam penelitian ini, risiko hutang akan diprosikan oleh *leverage*. *Leverage* akan menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau dengan kata lain seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur (Prasetya dan Irawan, 2012; dalam Andriyani dan Mudjiyanti, 2017). Ketika *leverage* tinggi maka dapat diasumsikan semakin banyak jumlah kreditur yang membutuhkan informasi yang lengkap untuk memahami seberapa banyak aset perusahaan dibiayai oleh perusahaan serta mempertimbangkan risiko gagal bayar perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika *leverage* tinggi akan berkaitan dengan banyak kreditur yang artinya memerlukan biaya agensi lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya

agensi tersebut manajemen perusahaan akan mengungkapkan lebih luas informasi melalui IFR. Berdasarkan penelitian Oktaviani, dkk. (2020), *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Namun berdasarkan penelitian Kurniawati (2018), *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Faktor ketiga adalah aktivitas pasar. Tandelilin (2010, dalam Lianawati dan Darmayanti, 2015) mengemukakan bahwa faktor aktivitas pasar memiliki pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Hal tersebut dikarenakan ketika investor melihat ramainya transaksi pada suatu saham maka investor akan semakin penasaran dengan informasi perusahaan tersebut (keuangan maupun non keuangan). Ketika pasar ramai menunjukkan banyaknya transaksi jual beli saham yang artinya calon investor membutuhkan informasi secara cepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai *Market to Book Value* menunjukkan investor tertarik terhadap saham perusahaan tersebut. Pada sisi lain, perusahaan akan berlomba melakukan praktik IFR untuk menunjukkan transparansi yang tinggi dan mengungkapkan informasi yang lebih luas yang dapat menarik perhatian investor serta mendapatkan kepercayaan publik. Berdasarkan penelitian Budianto (2018) aktivitas pasar berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*, sedangkan Angela dan Rachmawati (2021) mengemukakan bahwa aktivitas pasar tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Faktor keempat adalah kepemilikan saham publik. Sudana (2011, dalam Warouw, Tommy, dan Arie, 2018) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan, dimana pemilik berperan sebagai penyeter modal dalam perusahaan dan memberi wewenang kepada manajemen untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan dengan harapan manajemen bertindak demi kepentingan pemilik. Salah satu komponen dalam struktur kepemilikan adalah kepemilikan saham publik, dimana saham dimiliki oleh masyarakat yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (biasanya di bawah 5%). Meskipun kepemilikan saham setiap individu di bawah 5%, namun jumlah pemilik saham publik yang paling banyak dalam investor perusahaan. Pemilik saham publik juga berhak mendapatkan

informasi yang mudah didapatkan dan dapat membantu memahami kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin banyak jumlah kepemilikan saham publik akan mendorong perusahaan untuk lebih luas mengungkapkan informasi perusahaan dan akan lebih mudah jika perusahaan melakukan IFR. Berdasarkan penelitian Oktaviani, Andriati dan Larasati (2020), kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* sedangkan Khairunisa, Yudowati dan Madjidah (2019) mengemukakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*.

Objek penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor bahwa saham perusahaan yang diperjualbelikan di pasar saham di Indonesia tidak terlalu aktif sedangkan dalam penelitian ini mengangkat variabel aktivitas pasar yang diproksikan dengan MBV untuk menunjukkan seberapa aktif saham suatu perusahaan. Oleh karena itu, dipilih objek dalam penelitian ini adalah saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 yang merupakan saham yang aktif diperjualbelikan di pasar saham. Bukan hanya itu, biasanya setiap enam bulan sekali akan diperbaharui saham perusahaan apa saja yang terdaftar di LQ-45. Penentuan populasi dalam penelitian ini dengan melihat pada ringkasan performa LQ-45 melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia, lalu menentukan seluruh perusahaan LQ-45 yang setidaknya pernah sekali masuk dalam indeks LQ-45 dalam periode 2018-2020. Biasanya banyak investor yang memantau saham perusahaan LQ-45, karena yang menjadi unggulan pun akan berubah sesuai aktivitas transaksi saham yang terjadi. Oleh karena itu, perusahaan LQ-45 memiliki kewajiban melakukan pelaporan keuangan yang mencakup informasi keuangan maupun non keuangan sehingga perusahaan LQ-45 akan cenderung memanfaatkan IFR. Periode penelitian adalah 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*?
2. Apakah risiko hutang berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*?
3. Apakah aktivitas pasar berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*?
4. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diajukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *Internet Financial Reporting*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko hutang terhadap *Internet Financial Reporting*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aktivitas pasar terhadap *Internet Financial Reporting*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap *Internet Financial Reporting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
Sebagai saran bagi penelitian selanjutnya supaya dapat mengembangkan penelitian yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas penyajian IFR terkait tingkat kelengkapan dan relevansi informasi pada perusahaan LQ-45.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai saran bagi perusahaan supaya mempertimbangkan faktor-faktor seperti komisaris independen, risiko hutang, aktivitas pasar dan kepemilikan

saham publik terhadap kelengkapan informasi IFR sehingga citra perusahaan baik di mata publik.

- b. Sebagai sarana bagi *stakeholder* untuk memahami ketersediaan informasi dalam IFR yang lebih efisien dan praktis.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi tentang konsep-konsep dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, ringkasan dari penelitian terdahulu yakni perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis penelitian, dan rerangka penelitian yang menjadi model analisis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 terdiri dari: desain penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data yang dipilih sebagai acuan penelitian, pengukuran variabel penelitian, teknik analisis data, ukuran dan teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang dipilih dan ditetapkan sebelumnya serta bagaimana metode pengumpulan data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang hasil pengolahan data berupa penjelasan terkait karakteristik objek penelitian, hasil analisis data, deskripsi data dan pembahasan hasil setiap variabel.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab 5 akan menjelaskan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.